

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta menyatakan kemerdekaannya dari tangan penjajah. Namun sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia belum mempunyai tentara yang resmi. Padahal keberadaan tentara ini sangat penting bagi negara, terutama bagi Indonesia yang pada saat itu baru lahir serta dalam kondisi perpolitikan yang masih relatif labil. Organisasi kemiliteran memang sudah ada pada saat itu, namun baru sebatas Laskar. Menurut Sundhaussen (1988: 16), hal tersebut dinilai masih kurang efektif.

... Laskar tersebut tidak punya senjata, tidak terlatih, tidak berdisiplin, dan tidak memiliki pemimpin yang berpengalaman. Selain itu, mereka sering berselisih paham dengan pemerintah Soekarno dan tidak mau menerima perintah dari pemimpin nasional yang tidak bersikap tegas dalam menentang pendaratan pasukan-pasukan Sekutu dan Belanda. Pasukan Laskar tersebut juga sering terlibat dalam bentrokan kekerasan satu sama lain karena persoalan ideologi dalam usaha mereka untuk memiliki senjata ...

Akhirnya pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk tiga badan yaitu Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia dan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) (Ricklefs, 2008: 430). Dalam lingkungan BPKKP inilah dibentuk satu badan keamanan yang dinamakan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Untuk pelaksanaan

Rifky Azhari, 2012

**Reorganisasi dan Rasionalisasi...**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

tugas keamanan dan ketertiban di pantai, lautan dan daerah-daerah pelabuhan dibentuk BKR Laut yang diresmikan pada 10 September 1945.

Kehadiran BKR Laut ini tidak terlepas dari peranan tokoh-tokoh bahariawan yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine ketika penjajahan Belanda dan Kaigun pada zaman pendudukan Jepang. Dalam perkembangannya, BKR Laut ini kemudian berubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat Laut (TKR Laut) pada tanggal 5 Oktober 1945 yang bermarkas besar di Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Staf Umum Laksamana III M. Pardi. Ternyata pembentukan TKR Laut menimbulkan kekecewaan, khususnya bagi para pemuda mantan pelaut di jaman Belanda dan Jepang yang tidak lolos seleksi menjadi anggota TKR Laut. Akibat dari kekecewaan tersebut, para pemuda ini kemudian membentuk organisasi Marine Keamanan Rakyat (MKR) yang bermarkas di Surabaya dipimpin oleh Laksamana Muda Atmadji. Setelah Surabaya dikuasai oleh sekutu, maka pada bulan November-Desember 1945 Markas Tertinggi MKR dipindahkan ke Lawang dengan Laksamana Muda Atmadji dan Kolonel Gunadi sebagai Kepala Staf serta dibantu oleh Sjamsudin, Munadji, Katamhadi dan J. Sulamet. Sejak adanya MKR, maka terjadilah dualisme kekuasaan dalam tubuh organisasi militer laut Indonesia.

Hal tersebut juga menimbulkan kekacauan dalam organisasi ini, khususnya dalam komunikasi kesatuan komando. Hal itu dikarenakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh MKR selalu disetujui oleh dr. Mustopo selaku Menteri Pertahanan pada saat itu, sehingga tidak harus melakukan konsultasi kepada

Rifky Azhari, 2012

**Reorganisasi dan Rasionalisasi...**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Markas Tertinggi TKR Laut yang ada di Yogyakarta (Jusuf, 1971: 30-31). Dengan demikian, sering terjadi salah komunikasi antara TKR Laut dengan MKR. Akibat dari salah komunikasi, banyak tentara yang mengalami kebingungan karena setiap kebijakan yang dikeluarkan (baik oleh TKR Laut maupun MKR) adalah legal dan setiap tentara wajib untuk melaksanakannya.

Jika dianalisis lebih jauh, sebenarnya kekacauan di tubuh Angkatan Laut ini sudah terjadi semenjak awal terbentuknya BKR Laut. Perbedaan jumlah formasi tentara antara *Koninklijk Nederlandsche Leger* (KNIL) dan *Koninklijke Marine* (KM) dengan *Gyugun*, *Seinendan*, *Keibodan*, *Bōei Gijūgun*, *Heiho*, *Sen In Joseiho* dan PETA menjadi akar dari masalah. BKR Laut didominasi tentara yang berasal dari pendidikan *Koninklijk Nederlandsche Leger* (KNIL) dan *Koninklijke Marine* (KM), khususnya pada tingkat perwira. KNIL dan KM sendiri adalah pasukan tentara yang didirikan oleh pemerintahan Hindia-Belanda pada tahun 1836 untuk menjaga keamanan, ketertiban dan menjaga kekuasaan kolonial. Lulusan tentara bentukan Jepang, seperti *Gyugun*, *Seinendan*, *Keibodan*, *Bōei Gijūgun*, *Heiho*, *Sen In Joseiho* dan PETA memang ada, namun jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan perwira dan tentara lulusan KNIL dan KM.

Matunasi (2011 : 36-37) juga menjelaskan bahwa dalam hal perekrutan perwira KNIL dan KM dilakukan secara ketat, tidak seperti perekrutan yang dilakukan untuk menjadi perwira-perwira tentara Jepang. Pada perekrutan di KNIL dan KM, standar pendidikan minimal bagi calon perwiranya harus lulusan dari *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), *Algemeene Middelbare School*

Rifky Azhari, 2012

**Reorganisasi dan Rasionalisasi...**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

(AMS) atau *Hogere Burger School* (HBS). Ketiga sekolah itu adalah sekolah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Belanda dan hanya berlangsung paling lama adalah lima tahun (untuk HBS). *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), *Algemeene Middelbare School* (AMS) atau *Hogere Burger School* (HBS) adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk anak-anak golongan priyayi dengan biaya yang relatif sangat mahal pada saat itu (Nasution, 2001: 122-140). Para calon perwira yang lolos seleksi kemudian mengikuti pendidikan di Akademi Militer Kerajaan Belanda atau *Koninklijk Militaire Academie* (KMA).

Berbeda dengan perekrutan calon perwira KNIL dan KM, perekrutan perwira tentara bentukan Jepang tingkat pendidikan biasanya tidak dipermasalahkan (Dinas Sejarah TNI-AL, 1975: 69). Hal ini dikarenakan sistem perekrutan tentara bentukan Jepang yang lebih bersifat sukarela. Melihat kondisi Jepang pada tahun 1942 yang mulai terjepit oleh tentara Sekutu, hal tersebut dinilai wajar. Kekurangan jumlah tentara dan dalam posisi yang terjepit tersebut menyebabkan pemerintahan Jepang membuka sistem perekrutan besar-besaran, sukarela, dan pendidikan formal yang tidak diprioritaskan (Matunasi, 2011: 72-85).

Sementara itu, ditengah kekacauan dalam tubuh Angkatan Laut, Pemerintah pada tanggal 25 Januari 1946 mengubah nama TKR Laut menjadi Tentara Republik Indonesia Laut (TRI-Laut), dan pada bulan Februari 1946 nama TRI-

Laut diganti menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) (Dinas Penerangan TNI-AI, 2005: 161).

Menghadapi masalah tersebut, akhirnya pada tahun 1948 Hatta yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia mengajukan usul untuk mengadakan Reorganisasi dan Rasionalisasi serta membangun kembali angkatan bersenjata dan seluruh aparat negara. Sundhaussen (1988: 63-64) menjelaskan maksud dari usulan kebijakan Hatta tersebut, yakni:

Tujuan dasar kebijakan tersebut adalah untuk menciutkan jumlah personil angkatan bersenjata, meningkatkan efesiesnya, dan menempatkannya kembali di bawah pimpinan pemerintah. Tujuan yang disebut paling akhir itu sangat penting, karena kesatuan-kesatuan tempur saat itu mulai menguasai daerah-daerah kantong atau daerah-daerah front mereka secara mandiri dengan menempuh kebijaksanaan mereka masing-masing.

Pemerintah menerima baik usulan Hatta tersebut, sehingga pada tanggal 2 Januari 1948 Soekarno menandatangani sebuah dekrit yang memerintahkan agar semua kekuasaan di bidang pertahanan dipusatkan dalam kendali Menteri Pertahanan. Dalam pelaksanaannya dibentuklah Staf Umum Angkatan Perang yang bertugas untuk membantu tugas Menteri Pertahanan. Staf ini dibentuk di dalam lingkungan Kementerian Pertahanan dan dikepalai oleh Komodor Suryadharma (yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Udara) dan sebagai wakilnya dipilihlah Kolonel T. B. Simatupang (Sundhaussen, 1988: 64). Di bawah kementerian itu akan ditempatkan sebuah Markas Besar Pertempuran yang dipimpin oleh Sudirman yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil (suatu badan yang berkedudukan

Rifky Azhari, 2012

**Reorganisasi dan Rasionalisasi...**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dibawah garis koordinasi Kementerian Pertahanan yang bertugas mengatur kesatuan tempur dalam bidang taktis dan strategi).

Sesuai dengan keputusan itu pula, pada tanggal 17 Maret 1948 Hatta membentuk Komisi Reorganisasi ALRI serta mengangkat Kolonel R. Soebijakto sebagai ketuanya. Adapun tugas KRAL, adalah sebagai berikut:

- 1) Di Kementerian Pertahanan diadakan Staf Umum dan Staf Khusus Angkatan Laut.
- 2) Pimpinan adalah seorang Kepala Staf Angkatan Laut.
- 3) Wakil pimpinan adalah seorang Wakil Kepala Staf Angkatan Laut.
- 4) Di luar Kementerian hanya diadakan pangkalan-pangkalan atau Pusat Pendidikan (*Training Centre*).
- 5) Dalam Angkatan Laut, sementara tidak diadakan Tentara Laut (Mariniers).
- 6) Tentara Laut dileburkan dalam TNI Angkatan Darat. Anggota yang ingin tetap dalam Angkatan Laut, dalam waktu satu bulan harus membuat surat permohonan kepada Menteri Pertahanan melalui Panglima Besar Angkatan Perang Mobil.
- 7) a) Polisi Tentara Angkatan Laut yang berdekatan dengan Pangkalan Angkatan Laut dimasukkan dalam Angkatan Laut dan dijadikan Polisi Militer Angkatan Laut.  
b) Yang berada di luar pangkalan, dilebur dengan Polisi Tentara menjadi Polisi Militer Angkatan Darat di bawah Komando Teritorium Angkatan Darat.

Rifky Azhari, 2012

**Reorganisasi dan Rasionalisasi...**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- 8) Selama Kepala Staf Angkatan Laut dan Wakilnya belum diangkat maka dalam masa peralihan Ketua/ Wakil Ketua Komisi memimpin Angkatan Laut atas nama Menteri Pertahanan.
- 9) Supaya organisasi Angkatan Laut segera terlaksana, semua perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Ketua/Wakil Komisi atas nama Menteri Pertahanan harus dilaksanakan dengan segera dan tertib.
- 10) Semua anggota Angkatan Laut yang tidak menjalankan perintah-perintah tersebut akan dipecat dari jabatannya dan akan disidang oleh Hakim Militer.

Dampak dari ditetapkannya Reorganisasi dan Rasionalisasi di TNI-AL juga mengakibatkan meleburnya Divisi I dan Divisi II Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) dan digabungkan ke dalam kesatuan Angkatan Darat. Corps Mariniers (C. M) bekas Pangkalan IV ALRI Tegal saat itu sesuai Instruksi Menteri Pertahanan menjadi bagian kesatuan 21, 22, 23 dan 24 dari Divisi II TLRI Jawa Tengah di bawah komando Divisi Diponegoro Angkatan Darat yang kemudian dikenal sebagai Resimen Samudera.

Pada tanggal 9 Oktober 1948, Menteri Pertahanan melalui Surat Keputusan No. A/565/1948 tentang kepangkatan ALRI dalam rangka Reorganisasi dan Rasionalisasi menetapkan berdirinya Korps Komando dalam lingkungan ALRI. Korps ini mulai melakukan seleksi penerimaan anggotanya pada tahun 1949 pasca disepakatinya hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB). Dari seleksi tersebut, diterimalah anggota Korps Komando sebanyak 1200 orang yang 95% anggotanya

Rifky Azhari, 2012

**Reorganisasi dan Rasionalisasi...**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

adalah berasal dari Corps Mariniers IV Tegal (Matanasi dan Kurniawan, 2011: 26).

Pelaksanaan Reorganisasi di Tentara Nasional Indonesia ini menimbulkan kekecewaan bagi beberapa pihak, salah satunya adalah golongan Atmadji (Bagian Sejarah KKO-AL, 1971: 9). Atmadji sebelum terjadinya Reorganisasi sendiri menjabat sebagai Kepala MKR. Organisasi ini sesuai keputusan Komisi Reorganisasi Angkatan Laut harus melebur ke dalam Angkatan Darat. Atmadji pun dipindah tugaskan ke Kementerian Pertahanan. Atmadji yang merasa kecewa dengan keputusan tersebut akhirnya memilih terlibat dalam pemberontakan Partai Komunis Indonesia Madiun di tahun 1948. Kekecewaan Atmadji dan kawan-kawan juga diperparah dengan semakin berkurangnya jumlah makanan, pakaian dan persenjataan dalam tubuh ALRI.

Berdasarkan beberapa pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji suatu permasalahan yaitu bagaimana proses Reorganisasi dan Rasionalisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut? Alasan pengambilan judul tersebut yakni: *Pertama*, kurangnya penulisan sejarah terutama sejarah militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL). Beberapa tulisan tentang sejarah militer di Indonesia, mayoritas membahas tentang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Sedangkan seperti yang kita ketahui, di Indonesia tidak hanya Angkatan Darat saja yang berperan dalam sejarah Indonesia, masih ada Angkatan Laut serta Angkatan Udara yang juga turut aktif dalam dinamika sejarah militer di negara Indonesia. *Kedua*, pengambilan masalah tentang

Rifky Azhari, 2012

**Reorganisasi dan Rasionalisasi...**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Reorganisasi dan Rasionalisasi di Angkatan Laut dikarenakan terdapat fenomena unik yang terjadi pada dinamika kemiliteran yang ada pada organisasi militer tersebut. Seperti, beberapa organisasi yang ada di Angkatan Laut ketika berlangsungnya Reorganisasi dan Rasionalisasi tersebut dimasukkan ke dalam Angkatan Darat khususnya Daerah Komando IV Diponegoro yang berada di Jawa Tengah, konflik internal yang terjadi dalam Angkatan Laut antara perwira lulusan KNIL dengan perwira lulusan Laskar, konflik yang terjadi akibat dari kebijakan Komisi Reorganisasi Angkatan Laut yang menimbulkan kekecewaan bagi beberapa pihak yang organisasinya harus dilebur ke Angkatan darat atau bahkan dibubarkan (seperti golongan Atmadji), pembentukan Korps Komando yang sebenarnya merupakan metamorfosa dari Corps Mariniers yang sempat dibubarkan. Fenomena-fenomena tersebut memang tidak berdampak besar seperti yang terjadi dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat hingga berdampak nasional dengan terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. Di mana KSAD (pada saat itu dijabat A. H. Nasution) dan tujuh panglima daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dibubarkan. Kemal Idris, salah satu dari tujuh panglima, pernah mengarahkan moncong meriam ke Istana. Dalihnya melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi mahasiswa (Elson, 2009: 256-257). Salah satu latar belakang dari peristiwa tersebut adalah adanya konflik intern dalam tubuh TNI-AD.

Tahun kajian yang peneliti fokuskan yakni dari tahun 1948 hingga 1950. Hal tersebut didasarkan pada tahun 1948 ini Hatta selaku Perdana Menteri

Rifky Azhari, 2012

**Reorganisasi dan Rasionalisasi...**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Republik Indonesia pada saat itu mengusulkan untuk dilakukannya Reorganisasi dan Rasionalisasi tentara, dan pada tahun yang sama tepatnya pada tanggal 2 Januari 1948 Soekarno mengesahkan usul tersebut (Sundhaussen, 1988: 64).

Tahun 1950 dijadikan tahun akhir kajian dikarenakan peneliti ingin melihat konsekuensi dari adanya Reorganisasi dan Rasionalisasi tersebut setelah berlangsung selama dua tahun. Pada tahun 1950, ALRI yang sesuai Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 sudah bisa melaksanakan tugas dengan baik dalam bidang keamanan dan pertahanan di seluruh daerah maritim di Indonesia. Pada tahun ini juga, ALRI yang mengganti namanya menjadi ALRIS (Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat) mengadakan konsolidasi terutama dalam bidang organisasi, personil dan materil (Jusuf, 1971: 50).

Berdasarkan fakta di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang Reorganisasi dan Rasionalisasi dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Sekaligus peneliti juga ingin mengetahui konsekuensi dari adanya peristiwa tersebut terhadap dinamika kemiliteran dalam organisasi militer tersebut. Oleh karena itu, peneliti merumuskan permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Reorganisasi dan Rasionalisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) 1948-1950: *Dari Pembentukan Komisi Reorganisasi (KRAL) hingga Terbentuknya Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL)*”.

## 1.2. Rumusan dan Batasan Masalah

Rifky Azhari, 2012

**Reorganisasi dan Rasionalisasi...**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Berdasarkan beberapa pokok pemikiran yang dipaparkan di atas terdapat satu permasalahan utama yang akan dikaji yaitu “bagaimana proses Reorganisasi dan Rasionalisasi yang terjadi pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut?” Agar permasalahan yang akan dikaji lebih jelas dan fokus, penulis akan merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi Komisi Reorganisasi Angkatan Laut (KRALRI) terhadap pengintegrasian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut?
2. Bagaimana kontribusi terbentuknya Korps Komando terhadap pengintegrasian tentara dalam Angkatan Laut?
3. Apa saja hambatan yang terjadi pada proses Reorganisasi dan Rasionalisasi dalam Angkatan Laut itu?
4. Bagaimana dampak dari adanya Reorganisasi dan Rasionalisasi TNI-AL terhadap dinamika politik nasional?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut, yakni untuk :

1. Mendeskripsikan kontribusi dari Komisi Reorganisasi Angkatan Laut (KRALRI), baik itu tugas, fungsi serta konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh komisi tersebut terhadap pengintegrasian tentara Angkatan Laut Republik Indonesia.

2. Menjelaskan kontribusi terbentuknya Korps Komando terhadap pengintegrasian tentara di Angkatan Laut, baik itu pengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap proses integrasi tentara di Indonesia.
3. Menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi pada proses Reorganisasi dan Rasionalisasi di dalam militer Angkatan Laut itu, baik itu yang berasal dari internal Angkatan Laut itu sendiri hingga hambatan eksternal dari pihak lain selain angkatan tersebut.
4. Menganalisis dampak dari adanya Reorganisasi dan Rasionalisasi TNI-AL terhadap pembentukan tentara TNI-AL tersebut hingga menjadi tentara yang profesional sehingga nantinya banyak dari kalangan militer yang terlibat dalam dinamika politik nasional.

#### **1.4. Metode dan Teknik Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode historis. Metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986: 32). Sebagaimana dikemukakan pula oleh Ismaun (2005: 35) bahwa metode ilmiah sejarah adalah proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis bukti-bukti dan data-data yang ada sehingga menjadi penyajian dan cerita sejarah yang dapat dipercaya.

Rifky Azhari, 2012

**Reorganisasi dan Rasionalisasi...**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Mengenai langkah-langkah dalam penelitian ini menurut Sjamsuddin (2007: 85-239) antara lain sebagai berikut :

1. Heuristik, yaitu proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pencarian sumber-sumber sejarah baik yang berupa wawancara, buku, dokumen, maupun artikel. Realisasi dari tahap ini, peneliti mencoba mengunjungi beberapa perpustakaan yang dianggap mempunyai sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Realisasinya, peneliti mengunjungi Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, Perpustakaan Dinas Penerangan Subdinas Sejarah TNI Angkatan Laut, Perpustakaan Dinas Penerangan Korps Marinir TNI-AL, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga mencoba mengkaji sumber-sumber artikel dari internet yang dianggap relevan dengan pembahasan ini.
2. Kritik Sumber, merupakan langkah selanjutnya dari metode ilmiah sejarah yang dilakukan ketika sumber-sumber sejarah telah ditemukan. Kritik sumber terbagi dalam dua tahap, yaitu Kritik Eksternal dan Kritik Internal. Kritik Eksternal ditujukan untuk menilai otentisitas sumber sejarah. Pada tahap kritik ekstern dipersoalkan bahan dan bentuk sumber, umur, dan asal dokumen, kapan dibuat, dibuat oleh siapa, instansi apa, atau atas nama siapa. Dalam pelaksanaannya, peneliti mencoba menilai sumber-sumber

sejarah tersebut berdasarkan ketentuan dari kritik eksternal. Kritik Internal lebih ditujukan untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, kemampuan pembuatannya, tanggung jawab dan moralnya. Pada tahap ini, peneliti membandingkan isi dari sumber-sumber sejarah dari satu penulis buku dengan penulis buku lainnya dengan maksud agar fakta-fakta sejarah yang diperoleh lebih valid untuk mendukung pembahasan yang akan dikaji.

3. Interpretasi adalah proses pemberian penafsiran atas fakta-fakta sejarah yang telah dikritik melalui kritik sumber. Proses interpretasi ini dilakukan untuk memberikan makna pada fakta-fakta sejarah agar dapat mendukung peristiwa yang dikaji. Dalam tahap ini, peneliti memberikan penafsiran pada fakta-fakta sejarah yang diperoleh selama penelitian dengan menghubungkan beberapa fakta menjadi suatu kesatuan makna yang sejalan dengan peristiwa tersebut.
4. Historiografi merupakan tahapan terakhir dari metode ilmiah sejarah dalam penelitian ini. Dimana dalam historiografi, fakta-fakta yang telah melalui berbagai macam proses kemudian disusun menjadi satu kesatuan sejarah yang utuh dan terbentuklah suatu skripsi. Dalam proses ini, peneliti mengerahkan seluruh daya pemikiran dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sintesis dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

Untuk mendukung hasil sintesis, peneliti menggunakan pendekatan interdisipliner yaitu pendekatan yang menggunakan disiplin ilmu yang dominan, yang ditunjang oleh ilmu-ilmu sosial lainnya. Dalam hal ini, peneliti mengambil satu disiplin ilmu yaitu ilmu sosial yang berupa ilmu politik, psikologi, serta sosiologi.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, yaitu mencari sumber baik berupa buku, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang kemudian dikaji untuk memperoleh solusi dalam memecahkan permasalahan penelitian.
2. Studi Dokumenter, yaitu suatu cara dalam pengumpulan data melalui media visual berupa foto-foto, gambar, serta arsip-arsip yang diambil pada waktu melakukan penelitian di lapangan.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya penulisan mengenai sejarah khususnya sejarah militer di Indonesia, sehingga nantinya dapat menimbulkan wawasan baru dan mengembangkan sejarah militer yang belum terkaji oleh para sejarawan.

2. Memberikan pengetahuan tentang dinamika perkembangan militer di Indonesia, khususnya dinamika yang terjadi di Angkatan Laut Republik Indonesia.
3. Memperkaya tulisan akademis tentang dinamika yang ada di Angkatan Laut Indonesia, karena selama ini penulisan tentang organisasi militer tersebut dinilai relatif kurang.

### **1.6. Struktur Organisasi Skripsi**

Mengenai struktur organisasi penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai uraian secara rinci tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan peneliti sehingga tertarik untuk melakukan penelitian yang ditujukan sebagai bahan penulisan skripsi dari rumusan masalah yang diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Bab ini memuat pula tujuan penulisan dari penelitian yang dilakukan metode penulisan serta sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan secara singkat tentang teori-teori yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah serta menganalisis fenomena yang terjadi

selama berlangsungnya Reorganisasi dan Rasionalisasi dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Menjelaskan secara rinci tentang cara kerja penulis dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Dalam ilmu sejarah, langkah-langkah tersebut meliputi : Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi.

### **BAB IV TERWUJUDNYA INTEGRASI ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**

Bab ini merupakan bagian utama dari skripsi yang berisi mengenai pembahasan seperti yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Ada pun rumusan masalahnya yaitu mendeskripsikan proses terbentuknya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), mendeskripsikan proses kerja dari Komisi Reorganisasi Angkatan Laut (KRALRI), menjelaskan latar belakang terbentuknya Korps Komando, menganalisis dampak dari adanya Reorganisasi dan Rasionalisasi TNI-AL serta menganalisis hambatan yang terjadi pada proses Reorganisasi dan Rasionalisasi di dalam Angkatan Laut itu.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Rifky Azhari, 2012

**Reorganisasi dan Rasionalisasi...**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi analisa terhadap isi pembahasan pada bab sebelumnya yang terangkum dari semua fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dari penulis yang diutarakan secara ringkas dan jelas. Selain itu, pada bab ini penulis memberikan saran kepada para pembaca agar lebih bijak ketika menyikapi adanya perubahan kebijakan.

